
**EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 05 TENTANG AKUNTANSI PERSEDIAAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA**

Yulinar Mulyani Ismail¹, Herman Karamoy², Rudy J. Pusung³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : ismail.yulinar@gmail.com

ABSTRACT

Inventory is one of the current assets in the form of goods or equipment owned by a government agency to be used in supporting government administration activities and is intended to be sold and/or delivered as a service to the community. The purpose of this study was to determine whether the application of inventory accounting applied by the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province was in accordance with the Statement of Government Accounting Standards Number 05 (PSAP 05). This study uses a comparative qualitative descriptive method and research data obtained through interviews and documentation. The results showed that the inventory accounting at the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province was in accordance with PSAP No. 05. For Financial Reports and so on, the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province must always effective and the resulting financial reports can be presented appropriately to interested parties.

Keywords : Government Accounting, Inventory Accounting, PSAP No. 05.

1. PENDAHULUAN

Dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah melakukan berbagai upaya dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Upaya ini dilakukan karena dengan adanya tuntutan publik terhadap Pemerintah agar dapat mengelola secara profesional dan efisien dengan membuka kesadaran bagi setiap orang terutama bagi aparat pemerintahan agar senantiasa tanggap dan peka terhadap tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan yang baik secara transparan dan memiliki akuntabilitas, serta dengan mengembangkan berbagai kebijakan akuntansi pemerintah dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (Arfianti dan A'yun, 2019:1)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah kerangka acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan pemerintahan terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). SAP semula ditetapkan pada PP RI No. 24 Tahun 2005, lalu digantikan dengan PP RI No. 71 Tahun 2010. SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP, dilengkapi dengan Pengaturan Standar Pemerintahan dan disusun berdasarkan kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Ayuningtyas, 2021:1-2).

Persediaan pemerintah masih dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pemerintah, yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, persediaan juga dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional pemerintahan. Persediaan dalam pemerintahan termasuk ke dalam aset lancar karena persediaan diharapkan segera dipakai dalam kurun waktu 12 bulan setelah pelaporan (Hakim, 2020:2). Persediaan perlu dikelola

dengan baik secara transparan dan akuntabel, serta harus mengacu pada PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dalam Peraturan Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. Persediaan yang dikelola secara teratur menjadi hal yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga atau instansi pemerintahan agar dapat mengurangi kekeliruan atau kesalahan dalam pencatatan persediaan (Waworega, 2018:215).

Pada instansi pemerintahan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara, persediaan merupakan bagian penting dalam membantu pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk komoditas atau peralatan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, seperti barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang bekas pakai. Tanpa adanya persediaan akan sulit bagi instansi pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah pemerintahan yang luas. Dengan tidak adanya persediaan juga, kegiatan dalam instansi pemerintahan akan terganggu karena persediaan juga termasuk sebagai barang yang mendukung kegiatan administrasi di instansi pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan yaitu untuk mengetahui apakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP Nomor 05.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

1. Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Hans Kartikahadi, 2016:3). Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, peringkasan dan penyajian data keuangan dengan cara-cara tertentu, atau transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi publik serta penafsiran terhadap hasilnya (Mulyadi dan Regel, 2018:35).

2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah jasa yang memberikan informasi keuangan dari instansi pemerintah yang berguna dalam mengambil keputusan ekonomi sebagai suatu alternatif bagi pihak yang berkepentingan pada instansi pemerintah tersebut (Waworega, 2018:2015). Akuntansi pemerintah atau sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan (Nordian, dikutip dalam Permatasari, 2020:4).

3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Suwanda dan Santosa, dikutip dalam Hendri, 2020:8). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan aspek penting yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Mahmudi dan Hendri, 2020:80).

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan pada lingkup pemerintahan, baik pemerintahan pusat dan departemen-departemennya maupun pada pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang

berarti adanya informasi keuangan pemerintahan serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas (Hasanah dan Fauzi, 2017:28-29).

Yang menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan BA pada pemerintahan daerah yaitu Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, terdapat dua entitas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun suatu laporan keuangan, yaitu entitas atau unit pelaporan dan entitas atau unit akuntansi, dimana entitas atau unit pelaporan adalah bagian dari pemerintahan yang mencakup satu atau lebih unit akuntansi atau unit pelaporan dan menurut ketentuan peraturan perundangundangan diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah, sedangkan entitas atau unit akuntansi adalah bagian pengguna anggaran atau pengguna barang pemerintahan yang diwajibkan untuk membuat laporan keuangan agar dapat digabungkan pada unit pelaporan.

Dalam sistem pemerintahan daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) berperan sebagai entitas pelaporan dan yang berperan sebagai entitas akuntansi yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4. Akuntansi Persediaan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Paragraf 4 Nomor 71 Tahun 2010, persediaan merupakan aset lancar berbentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari instansi pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan (Nordriawan dan Hendri, 2020:79).

Definisi dari persediaan dalam akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pemerintahan. Karakteristik pemerintahan yang hampir sama dengan organisasi sektor publik lainnya dan yang berbeda dengan perusahaan adalah sumber daya ekonominya dikelola bukan untuk mencapai laba operasi, tetapi diperoleh melalui cara-cara khusus seperti sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela (Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi 2017:69).

5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 yaitu tentang Akuntansi Persediaan. PSAP 05 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu lampiran I.06 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua dan dalam lampiran II.06 untuk SAP Berbasis Kas Menuju Akrua. Tujuan PSAP Nomor 05 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Wa Hendri pada tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu Penerapan PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif yaitu menjelaskan dan membandingkan penerapan akuntansi persediaan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bantaeng dengan PSAP Nomor 05. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi persediaan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng dengan PSAP Nomor 05 Tahun 2010. Hasil penelitiannya menyatakan Akuntansi Persediaan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bantaeng telah sesuai dengan standar yang berlaku dengan berdasarkan pada indikator pengukuran yaitu pengakuan, pengukuran dan pengungkapan.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Aprillinda Angie Waworega pada tahun 2018 dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini diuraikan secara sistematis tentang keadaan yang sesungguhnya yang terjadi mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan pada BKPSDM Kabupaten Minahasa. Adapun hasil penelitiannya yaitu Akuntansi Persediaan pada BKPSDM Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan PSAP Nomor 05.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Ardhiyanto Dwi Qurrata A'yun pada tahun 2019 yang berjudul Perlakuan Akuntansi Persediaan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Kesehatan Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan fenomena-fenomena dalam perlakuan persediaan Dinas Kesehatan Kota Batu dengan tujuan untuk mengetahui penerapan persediaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi atas persediaan yang diterapkan pada Dinas Kesehatan Kota Batu, apakah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntansi Persediaan pada Dinas Kesehatan Kota Batu sebagian besar telah sesuai dengan PSAP Nomor 05 karena pada bagian pengungkapan persediaan masih belum sesuai dengan PSAP Nomor 05.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif, yaitu menjelaskan dan membandingkan penerapan akuntansi persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP Nomor 05. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jl. Tololiu Supit Nomor 25 Tingkulu, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara.

3.2. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa gambaran umum, visi dan misi, serta struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan data kuantitatif berupa laporan keuangan, buku persediaan barang dan juga laporan pemeriksaan persediaan (*Stock Opname*). Sumber data adalah menggunakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan juga mengumpulkan dokumentasi yang ada.

3.3. Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan komparatif yaitu menjelaskan dan membandingkan penerapan akuntansi persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP No. 05 dengan proses analisis data sebagai berikut: (1) menguraikan proses akuntansi persediaan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP No. 05 tentang persediaan, (2) membandingkan proses akuntansi persediaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP No. 05 tentang persediaan, (3) mengevaluasi hal-hal yang sesuai dan hal-hal yang tidak sesuai pada proses akuntansi persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP No. 05 tentang persediaan, (4) membuat kesimpulan dan memberikan saran.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh keterangan yaitu:

1. Klasifikasi Persediaan,

Klasifikasi persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas beberapa persediaan yaitu: (1) Barang Habis Pakai, (2) Barang Konsumsi, (3) Suku Cadang, (4) Bahan Untuk Pemeliharaan, (5) Barang dalam proses/setengah jadi, (6) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras).

2. Pengakuan Persediaan

Persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diakui pada saat persediaan atau barang diterima beserta dengan kelengkapan dokumen-dokumennya. Hal itu ditandai dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Berita Acara Penyerahan Barang (BAPB) setelah barang diterima sampai dengan Laporan Pemeriksaan Persediaan (*Stock Opname*). Pengakuan persediaan pada Disperindag Prov. Sulut menggunakan pendekatan aset yaitu persediaan untuk keperluan sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditandai dengan Berita Acara Penyerahan Barang setelah barang diterima dilakukan pencatatan jurnal untuk pengakuan perolehan atas pembelian persediaan tersebut, diakui secara langsung untuk persediaan dengan kata lain memakai pendekatan aset.

3. Pengukuran Persediaan

Pengukuran persediaan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dicatat sebesar harga beli berdasarkan tanggal pembelian barang. Dimana harga beli yaitu sebagian dari harga perolehan. Dan seluruh pembelian dan pencatatan persediaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode FIFO.

4. Beban Persediaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Dengan kata lain, pencatatan hanya dilakukan bila ada penambahan, sehingga persediaan tidak diperbarui. Dengan melakukan inventarisasi pada akhir periode, dapat diketahui jumlah inventarisnya. Juga untuk pencatatan inventaris untuk keperluan sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

5. Pengungkapan Persediaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Semua barang persediaan dan perlengkapan lainnya yang masuk di kantor langsung dimasukkan dalam buku barang dengan menggunakan aturan prosedur penatausahaan barang persediaan yang baik dan benar. Disperindag Prov. Sulut tidak mengungkapkan jenis, jumlah dan nilai persediaan yang rusak karena tidak adanya data persediaan yang memenuhi kriteria tersebut.

6. Penyajian Persediaan

Penyajian persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

yaitu tentang prosedur penatausahaan barang persediaan. Persediaan Disperindag Prov. Sulut disajikan dengan menggunakan aturan prosedur yang benar yaitu dari BAST sampai dengan Laporan Pemeriksaan Persediaan (*Stock Opname*).

4.2. Pembahasan

1. Klasifikasi Persediaan

Klasifikasi persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas beberapa persediaan yaitu: (1) Barang Pakai Habis, seperti: a. ATK (Alat Tulis Kantor), b. Barang cetakan seperti dokumen dan administrasi, c. Perangko, materai dan benda/barang pos lainnya, d. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, (2) Barang Konsumsi, (3) Suku Cadang, (4) Bahan untuk Pemeliharaan, (5) Barang dalam proses/setengah jadi, (6) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras). Dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengklasifikasian persediaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan ketentuan yang terdapat pada PSAP Nomor 05.

2. Pengakuan Persediaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengakui persediaannya pada saat persediaan atau barang benar-benar diterima beserta dengan kelengkapan dokumen-dokumennya. Hal itu ditandai dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) sampai dengan Laporan Pemeriksaan Persediaan (*Stock Opname*) sebagaimana yang terdapat pada lampiran 2 sampai lampiran 10. Sehingga untuk poin pertama dan kedua, Disperindag Prov. Sulut telah sesuai dengan PSAP No. 05 karena didukung oleh bukti atau dokumen yang dapat diukur secara andal, jujur dan dapat diverifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diatas, pengakuan pembelian persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan pendekatan aset yaitu persediaan untuk keperluan sekretariat Disperindag Prov. Sulut ditandai dengan Berita Acara Penyerahan Barang setelah barang diterima dilakukan pencatatan jurnal untuk pengakuan perolehan atas pembelian persediaan tersebut.

3. Pengukuran Persediaan

Pengukuran persediaan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dicatat sebesar harga beli berdasarkan tanggal pembelian barang. Dimana harga beli juga merupakan bagian dari harga perolehan. Dan seluruh pembelian dan pencatatan persediaan di Disperindag Prov. Sulut menggunakan metode FIFO. Metode sistematis FIFO (*First In First Out*) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan. Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Persediaan Disperindag Prov. Sulut per 31 Desember 2020 pada Neraca sebesar Rp. 64,089,900.00 yang terdiri dari:

1) Persediaan Barang Habis Pakai berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp. 60,000.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Rincian Persediaan Barang Pakai Habis berupa ATK

Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
Kertas HVS F4	1 Rim	60,000.00	60,000.00
Jumlah	1 Rim	60,000.00	60,000.00

Sumber: Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (*Stock Opname*)

2) Persediaan Barang Peralatan dan Mesin lainnya sebesar Rp. 64,029,900.00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Rincian Persediaan Barang Peralatan dan Mesin

Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
Pertukangan Kayu/Mesin Pemotong Kayu	2 Pkt	11,476,180.00	22,952,360.00
Konveksi/Mesin Obras Listrik	1 Pkt	11,111,180.00	11,111,180.00
Alat Pengolahan Minyak	1 Pkt	17,505,180.00	17,505,180.00
Perbengkelan/Genset	1 Pkt	12,461,180.00	12,461,180.00
Jumlah	5 Pkt	52,553,720.00	64,029,900.00

Sumber: Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Pesediaan (*Stock Opname*)

4. Beban Persediaan

Berdasarkan PSAP No. 05 tentang persediaan, dipaparkan bahwa biaya persediaan dicatat pada saat persediaan digunakan. Perhitungan biaya persediaan dilakukan untuk memberikan laporan operasional. Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013, sistem akuntansi persediaan memiliki dua metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Menurut hasil penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, beban persediaan yang digunakan adalah metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadinya transaksi atau penambahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban persediaan pada Disperindag Prov. Sulut telah sesuai berdasarkan PSAP No. 05.

5. Pengungkapan Persediaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Semua barang persediaan dan perlengkapan lainnya yang masuk di kantor langsung dimasukkan dalam buku barang dengan menggunakan aturan prosedur penatausahaan barang persediaan yang baik dan benar. Disperindag Prov. Sulut juga mengungkapkan persediaan barang seperti barang atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan pelayanan publik, barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Karena kurangnya data inventaris yang memenuhi standar tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak mengungkapkan jenis, jumlah, dan nilai inventaris persediaan yang dalam keadaan rusak atau usang.

6. Penyajian Persediaan

Penyajian persediaan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu tentang Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan. Persediaan disajikan pada neraca bagian aset lancar. Untuk menyajikan persediaan di neraca, unit kerja melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan setiap semester. Selanjutnya, berdasarkan hasil *Stock Opname* dilakukan penyesuaian yaitu data persediaan. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sendiri dalam hal penyajian persediaan sudah mengikuti aturan yang berlaku artinya sudah sesuai dengan PSAP No. 05.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Klasifikasi persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP Nomor 05.
2. Pengakuan persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal pendekatan aset telah sesuai dengan PSAP Nomor 05.
3. Pengukuran persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP Nomor 05.
4. Pengungkapan persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP Nomor 05.
5. Penyajian persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP Nomor 05.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu:

1. Peneliti menyarankan agar mengadakan seleksi pegawai pada bagian pengurus barang yang disesuaikan dengan kualifikasi akademik atau pendidikan. Sehingga untuk melakukan tugasnya pegawai tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya, tidak hanya untuk bagian pengurus barang, tetapi juga berlaku di semua bidang. Peneliti merekomendasikan hal tersebut karena kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan oleh suatu bidang.
2. Untuk tahun anggaran periode selanjutnya, sebaiknya dapat meningkatkan dan mempertahankan efektivitas penerapan akuntansi persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan juga diharapkan untuk tetap berpedoman dan mengikuti pada peraturan yang ada, agar pelaksanaan penerapan akuntansi persediaan selalu efektif dan terwujud dan laporan keuangan bisa disajikan secara tepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, A. D. Q. (2019). Perlakuan akuntansi persediaan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Kesehatan Kota Batu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15461>
- Alimus, E. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1).
<http://dx.doi.org/10.35906/ja001.v6i1.543>
- Ayuningtyas, W. S. (2020). Perlakuan Akuntansi Atas Persediaan Alat Kontrasepsi Berdasarkan PSAP No. 05 pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
<http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/7334>

-
- Hakim, M. U. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pencatatan Persediaan Berdasarkan PSAP No. 5 Tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/99232>
- Hans Kartikahadi., dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasanah, Nuramalia dan Fauzi, Achmad. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: IN MEDIA
- Hendri, W., Mariati, M., & Tamsil, T. (2020). Penerapan Psap 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Inspektorat Kab. Bantaeng. *Accounting Journal*, 1(1), 305-312.
<http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/SA/article/view/260>
- Irawati, R. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
<http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/4062>
- Laikyer, K. P., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Analisis Kebijakan Akuntansi yang Digunakan dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 (Psap 05) Tentang Akuntansi Persediaan. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2).
<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1407>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan.
- Pemerintah Indonesia. 2019. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Bab VI mengenai Kebijakan Akuntansi Persediaan. Sekretariat Negara. Jakarta
- Permatasari, M. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/99295>
- Rifai, R. P., & Tinangon, J. J. (2017). Evaluasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(1).
<https://doi.org/10.35794/emba.5.1.2017.15418>
- Rondonuwu, G., Pangemanan, S. S., & Mawikere, L. M. (2016). Evaluasi penerapan metode persediaan berdasarkan metode FIFO pada PT. Honda Tunas Dwipa Matra Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).
<https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.13720>
- Sandiri, M. P., Ilat, V., & Pinatik, S. (2019). Evaluasi penerapan akuntansi persediaan obat untuk penentuan harga pokok penjualan pada PT. Cempaka Indah Murni Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).
<https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22323.2019>
-

Waworega, A. A., Manossoh, H., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20991.2018>